

**PENGARUH DIVERSITAS GENDER DEWAN KOMISARIS
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *SUSTAINABILITY
PERFORMANCE* SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019)**

Elan Levita Bana, Imam Ghozali¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the direct association between board commissioner gender diversity with tax avoidance and the mediation effect of sustainability performance on this association. 65 samples selected of non financial sector companies listed on Indonesia Stock Exchange from the period 2017-2019. Multiple regression used to analyze the direct relationship between board commissioner gender diversity and tax avoidance. Path analysis approach was employed to analyze the indirect relationship between board commissioner gender diversity and tax avoidance through sustainability performance as mediating variable. The results show that board commissioner gender diversity has significant and positive effect on tax avoidance. This implies that gender diversity in board commissioner increases the level of tax avoidance. Board commissioner gender diversity has no significant influence on sustainability performance. Path analysis result did not find support for mediating role of sustainability performance on the relationship between board commissioner gender diversity and tax avoidance.

Keywords: board commissioner gender diversity, sustainability performance, tax avoidance

PENDAHULUAN

Menurut OECD (2010), negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan pajaknya (Mohanadas et al., 2019). Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa penerimaan negara dari perpajakan merupakan sumber terbesar penerimaan bagi negara Indonesia. Di tahun 2018 penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 78,1% dari seluruh total pendapatan. Penerimaan negara tersebut akan digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Namun, pajak merupakan suatu pengeluaran yang relatif signifikan bagi perusahaan. Pengeluaran untuk membayar pajak dapat menurunkan laba setelah pajak, tingkat return, dan arus kas sehingga perusahaan akan berupaya melakukan pengelolaan dalam perpajakan agar jumlah pembayaran pajaknya dapat diminimalisasi (Yuniarwati et al., 2017). Upaya yang dilakukan dengan tujuan mengurangi beban pajak yang akan dibayar dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Definisi agresivitas pajak menurut Frank et al. (2009) merupakan kegiatan perencanaan pajak secara legal, ilegal, dan di antaranya (*grey area*) yang dilakukan manajemen untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Tindakan meminimalkan jumlah pembayaran pajak secara ilegal disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan tindakan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak secara legal disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Yuniarwati et al., 2017).

Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan. Aktivitas agresivitas pajak merupakan aktivitas yang umum dalam bisnis secara global (Lanis dan Richardson, 2011). Tiga perusahaan besar yaitu Google, Facebook, dan Microsoft melakukan tindakan penghindaran pajak yang nilainya mencapai Rp 41 triliun per tahun di berbagai negara dengan memanfaatkan celah-celah pada sistem perpajakan global dan salah satunya di Indonesia, dan pemeriksaan tidak menemukan adanya bukti pelanggaran perpajakan oleh

¹ *Corresponding author*

ketiga perusahaan tersebut (Nurhaliza, 2020). Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan pajak negara dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan rasio pajak, yaitu rasio penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Menurut laporan Bank Dunia, rasio pajak Indonesia tahun 2019 rasio pajak Indonesia termasuk rendah diantara negara-negara berkembang lainnya, yaitu sebesar 10,2%.

Dewan komisaris memegang peran untuk mengawasi jalannya kepengurusan perusahaan dan melakukan pemberian nasihat terkait kepengurusan perusahaan oleh direksi. Dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris memastikan perencanaan dan manajemen sumber daya yang efektif dalam jalannya perusahaan (Arfken et al., 2004). Menurut Erle (2008), dewan komisaris mengemban tanggung jawab akhir dalam urusan perpajakan dan dewan komisaris akan mempertanggungjawabkannya ke pemegang saham (dikutip dari Lanis et al., 2017). Laporan Higgs (2003) menyatakan bahwa di Inggris keragaman dalam dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas kinerja dewan komisaris dan merekomendasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari peran wanita profesional (dikutip dari Khaoula dan Mohamed Ali, 2012). Perusahaan kehilangan banyak bakat dan pengalaman ketika wanita kurang terwakili di dewan perusahaan (Khaoula dan Mohamed Ali, 2012). Publikasi oleh The Economist Intelligence Unit dan International Financial Corporation yang berjudul *Board Gender Diversity in ASEAN* menunjukkan Thailand merupakan negara dengan diversitas gender dalam dewan paling tinggi yaitu 20,4%, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ketiga yaitu 14,9%. Sedangkan negara-negara di Eropa (Norwegia, Prancis, Spanyol, Belanda, dan banyak negara lainnya) mulai mendorong diversitas gender di posisi puncak perusahaan melalui kebijakan *gender quota*.

Perbedaan karakteristik antara wanita dan pria tidak sebatas perbedaan fisik saja. Artikel oleh Gneezy dan Croson (2009) yang mendokumentasikan mengenai perbedaan fundamental dalam preferensi risiko, sosial, dan kompetisi diantara wanita dan pria mengungkapkan wanita memiliki sifat yang lebih menghindari risiko, lebih sensitif terhadap isyarat sosial, dan preferensi wanita terhadap kompetisi lebih rendah dibandingkan pria. Menurut Vacca et al. (2020), anggota dewan komisaris pria lebih berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih strategi perpajakan. Adams dan Ferreira menyatakan bahwa kehadiran perempuan di dewan komisaris mampu menahan perilaku oportunistik manajerial dan mencegah kebijakan yang salah dengan menghindari pajak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham (dikutip dari Hoseini et al., 2019).

Meningkatkan jumlah wanita dalam dewan komisaris membuka kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang lebih berorientasi kepada pemangku kepentingan (Arayssi et al., 2016). Menurut Carroll (1979, 1991, 1999) dan Bansal (2005) perusahaan yang ingin *sustainable* perlu menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu pemangku kepentingan ekonomi, sosial-politik dan pemangku kepentingan lingkungan (dalam Jia dan Li, 2020). *Sustainability* merupakan isu yang hangat dalam dunia bisnis saat ini. Investor mulai menoleh investasi yang menghasilkan *return* yang kompetitif dalam jangka panjang dan juga memberikan dampak secara sosial, yang dikenal dengan istilah *sustainable investing*. *Sustainability performance* (kinerja keberlanjutan) perusahaan dibangun dengan 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, menuntut perusahaan untuk tidak mengejar perolehan laba saja, perusahaan harus mengintegrasikan tindakan yang mempertimbangkan pilar-pilar keberlanjutan (*sustainability*) tersebut. *Sustainability* perusahaan merupakan perwujudan komitmen terhadap *Corporate Social Responsibility* (disingkat CSR) (Puspita dan Daljono, 2014). CSR dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan dan pajak adalah suatu tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan melalui pemerintah, sehingga perilaku pajak perusahaan mempunyai hubungan dengan bagaimana sikap perusahaan terhadap CSR (Hidayat et al., 2016). Perilaku penghindaran pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang secara sosial tidak bertanggung jawab sehingga tidak sejalan dengan prinsip *sustainability*. Penghindaran pajak merupakan permasalahan *sustainability* sehingga mengintegrasikan prinsip-prinsip *sustainability* mendukung berkurangnya tindakan penghindaran pajak (Bird dan Davis-Nozemack, 2018).

Dewan komisaris sebagai pemegang peran pengendalian dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab ke banyak pemangku kepentingan. Perbedaan karakteristik antara dewan komisaris wanita dan pria dapat menyebabkan *sustainability performance* yang berbeda yang kemudian mempengaruhi perilaku pajak perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait

variabel diversitas gender dewan, penghindaran pajak, dan *sustainability performance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda (Lanis *et al.*, 2015; Vacca *et al.*, 2020; Sari dan Tjen, 2016; Zeng, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh diversitas gender dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dan menguji peran mediasi *sustainability performance* dalam hubungan tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori *Signaling*

Michael Spence (1973) memperkenalkan teori *signaling* melalui penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Dalam penelitian tersebut, Spence memberikan ilustrasi bahwa pencari kerja mengirimkan sinyal yang membedakan antara pencari kerja yang berkualitas tinggi dengan berkualitas rendah melalui pendidikan yang sudah ditempuh. Teori *signaling* berfokus utama pada tindakan yang diambil pengirim sinyal untuk secara sengaja mengomunikasikan kualitasnya yang positif dan tidak terlihat kepada pihak luar.

Mengacu pada penelitian oleh Ross (1973) perusahaan mengirimkan sinyal berupa kualitas yang jika dikaitkan dengan perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan yang tidak dapat diobservasi yang dapat meningkatkan arus kas perusahaan di masa depan. Kualitas tersebut disampaikan ke pihak eksternal melalui sinyal. Dewan komisaris perusahaan yang terstruktur berdasarkan keragaman demografis, seperti jenis kelamin, usia, etnis, efisien dalam peran pemantauannya (Kang *et al.* 2007; Ferreira 2010). Penelitian oleh Alabede (2016) menyimpulkan bahwa kehadiran wanita dalam dewan komisaris memberikan kontribusi yang besar terhadap peran dewan dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam peran pemantauan dan penasihat. Jika agresivitas pajak adalah sebuah kontinum, maka adanya wanita dapat membantu memastikan bahwa strategi yang diterapkan perusahaan tidak melewati batas *tax avoidance* atau dengan kata lain menyentuh pelanggaran pajak melalui pemantauan terhadap perencanaan pajak yang lebih baik sehingga mencapai tujuan penghematan pajak. Minnick & Noga, (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa investasi ke dalam manajemen pajak memberikan keuntungan untuk pemegang saham dimana manajemen pajak yang lebih baik memiliki hubungan positif terhadap tingginya pengembalian untuk pemegang saham. Manajemen dapat mengantisipasi manfaat dari adanya *tax avoidance* yang menghemat kas perusahaan sehingga akan diberikan kompensasi atas pencapaian tersebut. Perusahaan yang memiliki kehadiran wanita dalam susunan dewan komisaris akan mendorong penyampaian informasi-informasi mengenai kualitas tersebut. Keberadaan wanita dalam dewan komisaris yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan mewakili sinyal yang dikirimkan perusahaan dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai kualitas perusahaan dengan dewan komisaris yang tersusun dari wanita dan pria. Dari perspektif teori *signaling*, diversitas gender dalam dewan komisaris merupakan perwakilan sinyal yang perusahaan sampaikan agar dapat memberikan informasi mengenai kualitas perusahaan yang dapat menguntungkan pemegang saham yaitu penghematan pajak melalui *tax avoidance* dapat mengarahkan pada keuntungan bagi pemegang saham tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Teori *Stakeholder*

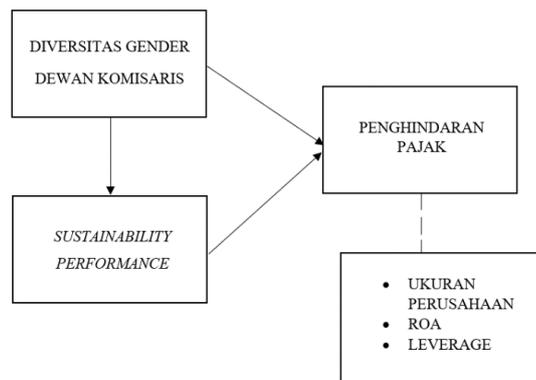
Teori *stakeholder* merupakan teori yang dapat menjelaskan hubungan antara diversitas gender dalam dewan komisaris, penghindaran pajak dan *sustainability performance*. Istilah *stakeholder* muncul pada tahun 1963 dalam memorandum Stanford Research Institute yang memaknai konsep *stakeholder* dengan “tanpa dukungan dari kelompok *stakeholder*, organisasi tidak akan bertahan” dan perusahaan harus memahami kebutuhan dan permasalahan kelompok *stakeholder* agar dapat menyusun tujuan yang akan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan teori *stakeholder* mengimplikasikan bahwa *stakeholder* memiliki kepentingan bersama, dan perusahaan harus berfokus pada bagaimana penciptaan nilai bagi setiap *stakeholder* agar perusahaan dapat menciptakan nilai (Freeman, *et al.*, 2015).

Teori *stakeholder* menyediakan kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dikarenakan teori *stakeholder* berkaitan dengan literatur *corporate sustainability* dan CSR (Ayuso dan Argandoña, 2009). Dewan komisaris merupakan bagian dari struktur tata kelola yang penting dan tidak jarang dewan komisaris merupakan pihak yang mendapat kritik dari pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Dewan komisaris yang efektif lebih cenderung menjamin kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

perusahaan lainnya (Garcia-Torea *et al.*, 2016). Adanya wanita dalam dewan komisaris membawa karakteristik yang berbeda dimana wanita memiliki gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, demokratis, dan komunal (dalam Ben-Amar *et al.*, 2017), menyumbang kemampuan yang lebih berorientasi pada pemangku kepentingan (Arayssi *et al.*, 2016), mempertimbangkan ukuran inovasi dan CSR perusahaan (Terjesen *et al.* (2009), dan wanita lebih peka terhadap kepentingan orang lain dan biasanya mempertimbangkan perspektif banyak pihak (Terjesen *et al.*, 2009). Diversitas gender dewan komisaris dapat mendorong *sustainability performance* perusahaan dengan bertindak dengan cara yang *sustainable* yang memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholder* dan kemudian perusahaan yang peduli terhadap kepentingan-kepentingan *stakeholder* juga akan tercermin dalam perilaku penghindaran pajaknya.

Kerangka pemikiran disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Teori *signaling* menjadi landasan dalam hubungan diversitas gender dalam dewan komisaris dengan tingkat penghindaran pajak. Dalam teori *signaling*, dewan komisaris yang beragam menjadi sinyal yang mewakili informasi kualitas perusahaan. Puncak atas sistem pengendalian keputusan dalam organisasi adalah dewan komisaris (Fama & Jensen, 1983) yang mengemban tanggung jawab akhir dalam urusan perpajakan perusahaan (Erle, 2008). Wanita cenderung memastikan penghematan pajak yang tidak melanggar peraturan dengan cara-cara yang legal atau disebut dengan istilah *tax avoidance*. Tingginya proporsi wanita komisaris meningkatkan atau mendorong agresivitas pajak sesuai hasil yang dipublikasikan oleh Fitriyawati (2018). Hal tersebut dapat dikarenakan bahwa wanita menerapkan kebijakan kas yang lebih konservatif dan keberadaan wanita dapat meningkatkan *cash holding* yang dilakukan melalui strategi penghindaran pajak untuk menghemat pengeluaran kas. Penelitian oleh Winasis dan Yuyetta, (2017) juga menemukan diversitas gender eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adams dan Funk (2012) melakukan survei terhadap dewan di negara Swedia dengan mengacu 10 *basic human value* yang dikembangkan Schwartz, hasilnya mengungkapkan bahwa komisaris wanita berbeda pada beberapa aspek jika dibandingkan dari wanita dalam populasi umum. Wanita dalam dewan kurang berorientasi pada keamanan dan tradisi dibanding komisaris pria, dan wanita komisaris lebih menyukai risiko dibandingkan pria yang bertolak belakang dari wanita dalam populasi umum. Aktivitas *tax avoidance* dapat dipandang sebagai aktivitas yang berisiko, sehingga jika mengacu pada hasil penelitian tersebut, komisaris wanita dapat mendorong tingkat penghindaran pajak.

H1: Diversitas gender dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris terhadap Sustainability Performance

Dalam teori *stakeholder*, adanya wanita dalam dewan komisaris dapat menyumbang keahlian-keahlian yang lebih berorientasi pada pemangku kepentingan. Integrasi *sustainability* perusahaan didorong oleh sejumlah faktor, dan karakteristik manajemen puncak memiliki peran dalam *sustainability performance* yang dapat mendorong integrasi tersebut untuk memberikan hasil yang baik (Can, 2020). Wanita dinilai lebih berorientasi sosial daripada pria dan membawa diskusi

terkait *sustainability performance* dan pengendalian CSR (Jarboui *et al.*, 2020). Fernández Sánchez *et al.* (2011) mengemukakan bahwa dewan komisaris yang lebih beragam cenderung lebih memberikan perhatian pada bidang sosial kemudian mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan sehingga meningkatkan tanggung jawab sosial (dalam Ferrero-Ferrero *et al.*, 2015).

H2: Diversitas gender dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap sustainability performance.

Peran Mediasi Sustainability Performance

Penelitian yang dilakukan Zeng (2019) terhadap 35 negara memberikan bukti bahwa CSR memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Mouakhar *et al.*, (2020) juga melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa perusahaan dengan aktivitas terkait *sustainability performance* dapat menghasilkan penghindaran pajak yang lebih rendah. Penelitian Mao dan Wu (2019) memberikan bukti bahwa kinerja CSR mengurangi profitabilitas perusahaan dan selanjutnya menyebabkan penghindaran pajak perusahaan yang lebih rendah. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa *sustainability performance* memiliki pengaruh tidak langsung pada tingkat penghindaran pajak.

Dewan komisaris yang lebih beragam cenderung memberikan perhatian lebih dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan *sustainability performance*, yang selanjutnya dapat mencerminkan upaya lebih rendah dalam penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu:

H3: Sustainability performance memediasi hubungan antara diversitas gender dewan komisaris dan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel independen adalah diversitas gender dewan komisaris yang diukur sebagai persentase jumlah wanita dalam dewan komisaris sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menggunakan persentase wanita dalam dewan komisaris sebagai proksi diversitas gender dalam dewan, diantaranya penelitian oleh Jarboui dkk. (2020), Vacca dkk. (2020), dan Lanis dkk. (2015). Variabel dependen yaitu penghindaran pajak diukur menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*/ETR). Pengukuran ini mencerminkan tarif pajak rata-rata per rupiah laba atau arus kas. ETR merupakan proksi yang bersifat negatif (Luke & Zulaikha, 2016). ETR yang lebih tinggi mencerminkan penghindaran pajak yang lebih rendah (Thomsen & Watrin, 2018). Variabel mediasi *sustainability performance* yang menggunakan skor ESG sebagai proksi. Pengungkapan informasi ESG kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif guna meningkatkan *sustainability performance* perusahaan (Alsayegh *et al.*, 2020). Selain ketiga variabel tersebut digunakan 3 variabel kontrol, yaitu: 1) ukuran perusahaan yang diukur dengan menghitung logaritma natural total aset. Penelitian Lanis *et al.* (2015) mengungkapkan ukuran perusahaan sebagai karakteristik yang akan mempengaruhi angka ETR dimana perusahaan yang lebih agresif dalam kebijakan pajak adalah perusahaan besar. 2) ROA, yaitu rasio laba operasi terhadap total aset. Menurut Gaertner (2014), ROA merupakan variabel kontrol untuk penghasilan menurut laporan (*book income*). 3) *leverage*, yaitu rasio total liabilitas terhadap total ekuitas. Hutang mendorong perusahaan lebih agresif untuk mewujudkan pengurangan pajak karena adanya pembayaran bunga (Sari dan Tjen, 2016).

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipilih adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar tahun 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia. Untuk memilih sampel ditentukan sejumlah kriteria atau yang dikenal dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang harus dipenuhi sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan non keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 dan mata uang pelaporan keuangan disajikan dengan rupiah.
2. Skor pengungkapan ESG untuk tahun 2017-2019 tersedia di Bloomberg.
3. Tidak menyatakan laba negatif/rugi dalam laporan tahun 2017-2019 karena akan mengakibatkan nilai ETR yang negatif yang dapat mengacaukan sampel.
4. Secara konsisten selama tahun 2017-2019 mempublikasikan laporan tahunan.

Metode Analisis

Penelitian ini menerapkan analisis jalur dengan dua tahap regresi untuk menentukan besar pengaruh langsung yaitu variabel independen terhadap dependen secara langsung, dan menghitung besar pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi SP bersama dengan seluruh variabel kontrol. Untuk menghitung koefisien jalur, dibuat dua persamaan struktural yang dinyatakan sebagai berikut.

$$SP = \alpha + p_2BGD + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$ETR = \alpha + p_1BGD + p_3SP + p_4SIZE + p_5LEV + p_6ROA + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- ETR : *Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)
- BGD : *Board Gender Diversity* (Diversitas Gender Dewan Komisaris)
- SP : *Sustainability Performance*
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- LEV : *Leverage*
- ROA : *Return on Asset*
- α : Konstanta
- p_{1-6} : Koefisien Jalur
- ε_{1-2} : *Error*, dihitung dengan rumus $e = \sqrt{1 - R Square}$

Untuk menganalisis peran mediasi SP mengacu pada pendekatan Baron dan Kenny yang menyatakan syarat terjadi mediasi, yaitu: 1) Nilai koefisien *total effect* harus signifikan, 2) Koefisien jalur p_2 dan p_3 harus signifikan, 3) Apabila koefisien p_1 menjadi tidak signifikan, maka SP merupakan mediasi penuh, 4) Apabila koefisien p_1 signifikan dan kurang dari koefisien *total effect*, maka SP adalah mediasi parsial, 5) Apabila sejak awal koefisien *total effect* tidak signifikan, maka SP tidak memediasi, hanya ada hubungan langsung. Adapun jalur p_1 merupakan regresi variabel BGD terhadap ETR. Jalur p_2 merupakan regresi variabel BGD terhadap SP. Jalur p_3 merupakan regresi variabel SP terhadap ETR.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Data sekunder terkait penelitian dikumpulkan dari laporan tahunan dan keuangan dan terminal Bloomberg. Populasi yang dipilih adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar tahun 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia. Sampel diseleksi berdasarkan kriteria yang hasilnya disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.	622
Tidak memiliki data skor pengungkapan ESG yang tersedia Bloomberg untuk tahun 2017- 2019.	(554)
Laporan keuangan perusahaan tahun 2017-2019 tidak dinyatakan dalam mata uang rupiah.	(13)
Perusahaan memiliki laba yang negatif atau mengalami kerugian pada tahun 2017-2019.	(10)
Tidak konsisten menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2017-2019.	(0)
Jumlah perusahaan penelitian yang terpilih (1 tahun)	45
Jumlah data pengamatan yang terpilih untuk diolah (45 x 3)	135

Analisis Statistik Deskriptif

Sebanyak 135 data pengamatan terpilih diolah dengan *software* SPSS 22. Deteksi *outlier* dengan *box plot* dilakukan dan menyebabkan eliminasi sebanyak 70 data. Hasil akhir sampel penelitian berjumlah 65. Selanjutnya, uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai karakteristik data yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Analisis Data Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BGD	65	.00	.67	.1160	.16689
SP	65	9.50	55.37	29.7934	12.01080
ROA	65	.01	.22	.0923	.05067
LEV	65	.13	.77	.4017	.15669
SIZE	65	28.15	33.50	30.9178	1.26449
ETR	65	17.48	35.59	24.5932	4.04458
Valid N (listwise)	65				

Sumber: *Output* IBM SPSS 22

Tabel 2 menyajikan pengolahan statistik seluruh data pengamatan yang berjumlah 65 data pengamatan. Rata-rata data variabel BGD adalah 0,1160 atau 11.60%. Nilai *mean* untuk variabel BGD lebih rendah dibandingkan penelitian oleh Jarboui *et al.* (2020) yang melaporkan nilai *mean* sebesar 13.839% untuk perusahaan-perusahaan di Inggris dan oleh Vacca *et al.* (2020) sebesar 23.08% wanita pada dewan komisaris di perusahaan di Italia. Negara-negara di Asia cenderung tertinggal dalam tren diversitas gender dalam dewan secara global (Deloitte, 2018) sehingga menyebabkan lebih kecilnya *mean* dibandingkan penelitian Jarboui dkk (2020) dan Vacca dkk (2020). Variabel BGD memiliki nilai deviasi standar 0,16689 yang lebih tinggi daripada nilai *mean* 0,1160. Dengan demikian nilai-nilai pada data pengamatan variabel BGD lebih tersebar atau tidak cenderung berada di sekitar nilai *mean*. Nilai terendah variabel BGD adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 0,67 atau 67% dalam data pengamatan variabel BGD.

Variabel SP memiliki nilai *mean* 29,7934 dan deviasi standar 12,01080. Lebih rendahnya deviasi standar variabel SP dari nilai *mean* SP mengindikasikan bahwa *mean* dapat digunakan sebagai nilai yang tepat untuk merepresentasikan keseluruhan data pengamatan variabel SP dan nilai data cenderung tersebar di dekat nilai *mean*. Nilai terkecil dalam data pengamatan variabel SP adalah 9,50 dan nilai terbesar adalah 55,37. Variabel kontrol ROA memiliki nilai *mean* 0,0923 serta deviasi standar bernilai 0,05067. Nilai terkecil dalam data pengamatan variabel ROA adalah 0,01 dan nilai terbesar adalah 0,22. Variabel kontrol LEV memiliki nilai *mean* 0,4017 serta deviasi standar yang lebih rendah dari rata-ratanya yaitu 0,15669. Nilai terkecil dalam data pengamatan variabel LEV adalah 0,13 dan nilai terbesar adalah 0,77. Variabel SIZE memiliki nilai *mean* 30,9178 serta deviasi standar 1,26449. Nilai terkecil dalam data pengamatan variabel LEV adalah 28,15 dan nilai terbesar adalah 33.50. Variabel ETR memiliki nilai *mean* 24,5932 serta deviasi standar 4,04458 lebih rendah daripada *mean*. Nilai terkecil dalam data pengamatan variabel ETR adalah 17,48 dan nilai terbesar adalah 35,59.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Tabel 3
Uji Asumsi Klasik Model Regresi 1

Model	Durbin Watson	Glejser
1 BGD	1.784	.875

Asymp. Sig. (2-tailed): 0.200
a. Predictors: (Constant), BGD
b. Dependent Variable: SP

Sumber: *Output IBM SPSS 22*

Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Model regresi 1 menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 atau berada di atas 0,05. Hasil tersebut mendukung bahwa distribusi residual bersifat normal. Uji Glejser dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas data. Dalam model regresi 1, hasil signifikansi uji Glejser bernilai 0,875 yang lebih tinggi dari signifikansi 0,05. *Output* tersebut mendukung tidak adanya kondisi heteroskedastisitas untuk model regresi 1. Uji auto korelasi dilaksanakan dengan melihat angka Durbin Watson. Hasil regresi model pertama didapat nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,748. Menurut tabel Durbin Watson, nilai $DU=1,629$, sehingga $4-1,629 = 2,371$. Nilai DW jatuh di antara nilai DU dan $4-DU$ atau $DU < DW < 4-DU$ membuktikan bahwa autokorelasi tidak terjadi untuk model regresi pertama.

Tabel 4
Uji Asumsi Klasik Model Regresi 2

Model	Tolerance	VIF	Glejser	Durbin Watson
BGD	0,931	1.074	0,112	
SP	0,853	1.172	0,069	
1 ROA	0,970	1.031	0,280	2.025
LEV	0,851	1.175	0,142	
SIZE	0,769	1.301	0,056	

Asymp. Sig. (2-tailed): 0.200

Dependent Variable: ETR

Sumber: *Output IBM SPSS 22*

Uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed):* 0,200 atau berada di atas 0,05, yang mendukung bahwa distribusi residual adalah normal. Analisis keberadaan multikolinearitas dilakukan pada model regresi 2 yang memiliki variabel bebas lebih dari 1. Hasil menunjukkan nilai *tolerance* variabel BGD, SP, ROA, LEV, dan SIZE secara berurutan adalah 0,931, 0,853, 0,970, 0,851, dan 0,769. *Output tolerance* untuk seluruh variabel dependen pada model regresi kedua berada di atas 0,1. *Output VIF* untuk variabel BGD, SP, ROA, LEV, dan SIZE secara berurutan adalah 1,074, 1,172, 1,031, 1,175, dan 1,301. Seluruh nilai VIF untuk kelima variabel tersebut berada di bawah 10. Dengan demikian model regresi kedua memenuhi asumsi terbebas multikolinearitas.

Dalam model regresi 2, nilai signifikansi uji Glejser untuk variabel BGD, SP, ROA, LEV, dan SIZE adalah 0,112, 0,069, 0,280, 0,142, serta 0,056 secara berurutan. Model regresi 2 yang memiliki 5 variabel independen seluruhnya menghasilkan nilai signifikansi $>0,05$, yang mendukung tidak adanya kondisi heteroskedastisitas untuk model regresi kedua.

Hasil Uji Durbin Watson untuk model regresi 2 adalah 2,025. Berdasarkan tabel Durbin Watson, nilai DU adalah 1,767. Nilai $4-1,767$ adalah 2,233. Nilai DW jatuh di antara nilai DU dan $4-DU$ atau $DU < DW < 4-DU$ membuktikan bahwa autokorelasi juga tidak terjadi untuk model regresi kedua.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan pada model regresi 1 dan model regresi 2. Hasil regresi ditampilkan dalam tabel 8 dan tabel 9.

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis Model Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.576	.049		32.455	.000
BGD	-.138	.174	-.099	-.793	.431

R square: 0,01

Dependent Variable: SP

Sumber: Output IBM SPSS 22

Model regresi 1 yang memiliki variabel dependen SP serta variabel independen ETR menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,01 atau 1%, yang bermakna bahwa 1% variasi variabel SP dapat dijelaskan oleh variabel BGD. Uji statistik t menunjukkan nilai t berkoeffisien sebesar -0,793, dan signifikansi bernilai 0,431 lebih besar dari signifikansi 0,05 bermakna bahwa tidak terdapatnya pengaruh signifikan dari BGD terhadap SP. Hipotesis kedua tidak terdukung atau tidak terdapat pengaruh signifikan diversitas gender dewan komisaris terhadap *sustainability performance*.

Hasil tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa argumen. Perusahaan terpilih menjadi sampel diisi banyak perusahaan keluarga. Penunjukan komisioner wanita yang hanya mementingkan hubungan keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan pengalaman dapat mempengaruhi kinerja komisaris terkait isu *sustainability*. Berdasarkan Survey Bisnis Keluarga yang diadakan oleh Pricewaterhouse Coopers tahun 2018 terhadap pengambil keputusan kunci dalam bisnis keluarga di Indonesia, hanya 35% responden yang mengharapkan generasi mendatang yang bekerja di perusahaan untuk dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan atau cocok dengan peran yang harus dilaksanakan sebagaimana pekerja yang bukan anggota keluarga. Persentase tersebut terbilang rendah dibandingkan dengan persentase global yang mencapai 65%. Dengan demikian terdapat kemungkinan wanita yang terpilih tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan peran komisaris yang mendorong *sustainability performance*.

Penyebab lain adalah wanita dalam dewan komisaris di perusahaan Indonesia belum terepresentasikan dengan kuat. Dalam penelitian ini terdapat 65 sampel perusahaan yang terpilih, namun sebanyak 37 perusahaan atau sekitar 57% sampel tidak memiliki wanita dalam dewan komisaris yang menyebabkan rata-rata persentase wanita dalam dewan komisaris juga kecil, yaitu sebesar 11,6%. Dengan lebih dari setengah sampel perusahaan tidak memiliki wanita dan kecilnya rata-rata persentase wanita dalam dewan komisaris di Indonesia, hal ini dapat menjadi alasan mengapa tidak ditemukan pengaruh signifikan antara diversitas gender dewan komisaris terhadap *sustainability performance*.

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis Model Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.941	21.110		-.045	.965
BGD	-.302	.132	-.256	-2.292	.025
SP	.054	.099	.064	.551	.584
ROA	.821	9.619	.009	.085	.932
LEV	1.401	.346	.473	4.049	.000
SIZE	.304	.416	.090	.732	.467

Dependent Variable: ETR

R Square: 0,316

F Statistic (p value): <0,001

Sumber: *Output* IBM SPSS 22

Koefisien determinasi untuk model regresi 2 menunjukkan nilai sebesar 0,316 atau 31,6% yang bermakna bahwa sebesar 31,6% variasi ETR dapat dijelaskan oleh variabel-variabel BGD, SP, ROA, LEV. Uji statistik F model regresi 2 memiliki nilai signifikansi atau *p value* <0,001, yang berarti lebih kecil atau signifikan pada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan variabel independen dalam model regresi 2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ETR. *Output* pada tabel yang disajikan memberi kesimpulan bahwa diversitas gender dewan komisaris (BGD) bernilai *t* -2.292 dan signifikansi bernilai 0.025, signifikan pada 5% atau 0.05 dan koefisien beta negatif yaitu sebesar -0.302, sehingga variabel independen pada model regresi 2 yaitu diversitas gender dewan komisaris (BGD) mempunyai pengaruh signifikan yang berarah negatif terhadap penghindaran pajak (ETR). ETR merupakan proksi yang negatif, sehingga hasil uji statistik *t* mendukung hipotesis pertama sehingga diperoleh kesimpulan bahwa diversitas gender dewan komisaris secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori *signaling*, adanya wanita dalam dewan komisaris dapat menjadi sinyal dari peran pemantauan yang lebih baik dalam urusan perpajakan dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dengan menciptakan penghematan kas perusahaan.

Variabel *leverage* (LEV) memiliki *p value* <0.001 dengan nilai *t* 4.049 dan koefisien beta bernilai positif ditunjukkan dengan *output* nilai 1.401. *Output* tersebut mendukung bahwa variabel *leverage* (LEV) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (ETR). Tingginya angka rasio *leverage* mendorong tingkat penghindaran pajak. Sedangkan dua variabel kontrol lainnya yaitu ROA dan ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan *output* signifikansi bernilai 0.932 dan 0.467. ROA dan ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR).

Tabel 10
Analisis Jalur

<i>Antecedent</i>	<i>Consequent</i>					
	SP			ETR		
	<i>Standarized Coefficient</i>	Sig.	e	<i>Standarized Coefficient</i>	Sig.	e
BGD	-0,099	0,431	0,995	-0,256	0,025	
SP	-	-	-	0,064	0,584	
ROA	-	-	-	0,009	0,932	0,827
LEV	-	-	-	0,473	<0,001	
SIZE	-	-	-	0,090	0,467	

Sumber: data *output* SPSS 22, diolah

Analisis jalur dilakukan untuk menguji peran mediasi SP. Tabel 10 merangkum koefisien regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan hasil bahwa diversitas gender dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *sustainability performance* (*p value* 0,431 > 0,05) yang merupakan jalur 2 dan *sustainability performance* tidak menghasilkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*p value* 0,584 > 0,05) yang merupakan jalur 3. Berdasarkan teori Baron dan Kenny, kedua jalur tersebut harus signifikan agar terjadi peran mediasi. Dikarenakan kedua jalur tersebut tidak signifikan, maka disimpulkan tidak terdapat peran mediasi atau tidak terdapat pengaruh tidak langsung dari *sustainability performance*. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara diversitas gender dewan komisaris terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain terdapat pengaruh langsung (*direct effect*), namun tidak terdapat pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) melalui *sustainability performance*. Dengan demikian, *sustainability performance* tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan diversitas gender dewan komisaris dan penghindaran pajak. Alasan yang mendasar adalah *sustainability performance* memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan pada ETR yang melemahkan hubungan diversitas gender dewan

komisaris terhadap penghindaran pajak dalam model penelitian ini. Lebih lanjut lagi jika melihat hubungan langsung antara diversitas gender dewan komisaris dengan penghindaran pajak menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Kedua hasil tersebut cenderung menghilangkan efek mediasi *sustainability performance* terhadap hubungan antara diversitas gender dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian bertujuan untuk melakukan pengujian apakah diversitas gender dewan komisaris dan *sustainability performance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Secara lebih rinci menguji apakah diversitas gender dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan meneliti apakah terdapat peran mediasi *sustainability performance* dalam hubungan antara diversitas gender dewan komisaris dengan penghindaran pajak. Penelitian dilakukan terhadap 65 perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang terpilih. Diversitas gender dewan komisaris menggunakan proksi persentase wanita dalam dewan komisaris. *Sustainability performance* menggunakan proksi skor ESG yang dikeluarkan oleh Bloomberg. Penghindaran pajak diukur melalui proksi *effective tax rate* (ETR). Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh kesimpulan bahwa diversitas gender dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan positif pada penghindaran pajak, bermakna bahwa semakin besar diversitas gender dalam dewan komisaris maka dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Selanjutnya, diversitas gender dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh signifikan pada *sustainability performance*. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *sustainability performance* tidak memediasi hubungan antara diversitas gender dewan komisaris dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan memberikan bukti empiris bahwa diversitas gender dewan komisaris tidak mendorong *sustainability performance* sehingga *sustainability performance* tidak dapat memediasi hubungan antara diversitas gender dewan komisaris dengan penghindaran pajak. Namun, diversitas gender dewan komisaris secara langsung dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak.

Penelitian ini menghadapi sejumlah keterbatasan setelah melewati proses analisis. Keterbatasan pertama adalah jumlah sampel yang sangat kecil menjadi salah satu penyebab R^2 pada model regresi 1 yang sangat kecil. R^2 yang kecil pada model regresi 1 dapat juga terjadi karena hanya terdapat 1 variabel independen. R^2 yang kecil bermakna bahwa banyak faktor di luar model penelitian yang menjelaskan variasi dalam variabel independen model regresi 1. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan satu proksi untuk menghasilkan pengukuran penghindaran pajak. Terdapat banyak pengukuran-pengukuran yang dapat menjadi proksi untuk penghindaran pajak dan tidak dapat dipungkiri setiap pengukuran memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dalam menggambarkan penghindaran pajak.

Beberapa hal dapat dipertimbangkan dan disarankan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, menambah jumlah sampel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas populasi dan juga tahun penelitian. Diharapkan dengan menambah jumlah sampel dapat memperkuat signifikansi hasil dan hasilnya dapat lebih digeneralisasikan dan juga dapat meningkatkan R^2 model regresi 1. Hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan R^2 model regresi 1 adalah menambah variabel untuk model regresi 1. Variabel yang dapat ditambahkan salah satunya adalah diversitas gender dewan direksi. Kedua, saran untuk perluasan penelitian pada variabel diversitas gender dalam dewan komisaris dapat dikategorikan menjadi tidak ada wanita, terdapat satu wanita, atau lebih dari satu wanita sehingga dapat melihat apakah jumlah wanita tertentu dalam dewan komisaris dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian selanjutnya dapat mencoba atau menambah beberapa pengukuran ETR lain seperti *Cash ETR*. Dengan kombinasi beberapa pengukuran ETR diharapkan dapat memperkuat pengukuran yang menggambarkan penghindaran pajak.

REFERENSI

- Adams, R. B. (2016). Women on boards: The superheroes of tomorrow? *Leadership Quarterly*, 27(3), 371–386.
- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309.

- Alabede, J. O. (2016). Effect of Board Diversity on Corporate Governance Structure and Operating Performance: Evidence from the UK Listed Firms. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 7, 67–80.
- Alsayegh, M. F., Rahman, R. A., & Homayoun, S. (2020). Corporate economic, environmental, and social sustainability performance transformation through ESG disclosure. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9).
- Arayssi, M., Dah, M., & Jizi, M. (2016). Women on boards, sustainability reporting and firm performance. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(3), 376–401.
- Arfken, D. E., Bellar, S. L., & Helms, M. M. (2004). The Ultimate Glass Ceiling. *Journal of Business Ethics*, 50(2), 177–186.
- Ayuso, S., & Argandoña, A. (2009). Responsible corporate governance: Towards a stakeholder board of directors? *Corporate Ownership and Control*, 6(4 A), 9–19. <https://doi.org/10.22495/cocv6i4p1>
- Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability Initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project. *Journal of Business Ethics*, 142(2), 369–383.
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1009–1025.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67.
- Deloitte. (2018). Sustainability and the board: What do directors need to know in 2018? Ww2.Deloitte.Com, March, 1–7.
- Erle, Bernd. (2008). Tax Risk Management and Board Responsibility. 10.1007/978-3-540-77276-7_15.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). The Booth School of Business of the University of Chicago The University of Chicago Law School CONTRACTING COSTS AND RESIDUAL CLAIMS: THE SEPARATION OF OWNERSHIP AND CONTROL. *Journal of Law and Economics*, XXVI(2), 301–325.
- Ferrero-Ferrero, I., Fernández-Izquierdo, M. Á., & Muñoz-Torres, M. J. (2015). Integrating Sustainability into Corporate Governance: An Empirical Study on Board Diversity. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(4), 193–207.
- Freeman, R. E. (2015). Strategic management: A stakeholder approach. In *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.
- Fitriyawati, D. S. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–24.
- Garcia-Torea, N., Fernandez-Feijoo, B., & de la Cuesta, M. (2016). Board of director's effectiveness and the stakeholder perspective of corporate governance: Do effective boards promote the interests of shareholders and stakeholders? *BRQ Business Research Quarterly*, 19(4), 246–260.
- Gneezy, U., & Croson, R. (2009). Gender Differences in Preferences. *Journal of Economic Literature*, 47(2), 448–474.
- Heryana, T., & Lathif, A. Z. (2019). *Corporate Social Responsibility Disclosure, Ownership Structure and Tax Aggressiveness*. 65(Icebef 2018), 68–72.
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., Suratno, H., Akuntansi, M., Pancasila, U., Sawah, J. S., & Hidayat,

- K. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(2), 39–58.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212.
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*.
- Jia, J., & Li, Z. (2020). Does external uncertainty matter in corporate sustainability performance? *Journal of Corporate Finance*, 65(September), 101743.
- Khaoula, A., & Mohamed Ali, Z. (2012). Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning in American Firms. *Business Management and Strategy*, 3(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 144(3), 577–596.
- Luke, & Zulaikha. (2016). Agresivitas Pajak. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak*, 80–96.
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2019). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612.
- Mouakhar, K., Kachouri, M., Riguen, R., & Jarboui, A. (2020). The effect of sustainability performance and CSR on corporate tax avoidance with board gender diversity as mediating variable Rakia Riguen Anis Jarboui. *Recherche en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias de Gestión*, 138, 305–339.
- Nurhaliza, S. (n.d.). Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun - IDX Channel. *IDXchannel.com*. Diakses 30 Oktober 2020, dari <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- Puspita, A. A., & Daljono. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corporate Sustainability Performance. 3, 1–12.
- Sari, D., & Tjen, C. (2016). Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance, and Tax Aggressiveness. *International Research Journal of Business Studies*, 9(2), 93–104.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Terjesen, S., Sealy, R., & Singh, V. (2009). Women directors on corporate boards: A review and research agenda. *Corporate Governance: An International Review*, 17(3), 320–337.
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(November), 40–63.
- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: Evidence from Italian listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5).
- Yuniarwati, Ardana, I. C., Dewi, P. S., & Lin, C. (2017). Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10).



- Winasis, S. E., & Yuyetta, E. N. A. (2017). Pengaruh Gender Diversity Eksekutif terhadap Nilai Perusahaan, Tax Avoidance sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–14.
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257.